



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGUKURAN KUALITAS KEBIJAKAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa guna mendorong terwujudnya pembentukan kebijakan yang berkualitas di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dilakukan pengukuran kualitas kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2026 sebagai indikator keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi untuk area perubahan deregulasi kebijakan;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pengukuran kualitas kebijakan di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2026, perlu membentuk tim pengukuran kualitas kebijakan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Pengukuran Kualitas Kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);
3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 426);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENGUKURAN KUALITAS KEBIJAKAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengukuran Kualitas Kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Tim Pengukuran Kualitas Kebijakan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengukuran Kualitas Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan analisis kuisioner dan identifikasi bukti pendukung dalam rangka penilaian mandiri kualitas kebijakan BPIP tahun 2026;
 - b. melakukan pengisian kuisioner dan pengunggahan bukti pendukung dalam sistem informasi pengukuran kualitas kebijakan;
 - c. melakukan validasi isian kuisioner dan kesesuaiannya dengan bukti pendukung yang telah diunggah dalam sistem informasi pengukuran kualitas kebijakan; dan
 - d. mengirimkan hasil pengukuran kualitas kebijakan BPIP tahun 2026 kepada Lembaga Administrasi Negara selaku Koordinator Utama melalui sistem informasi pengukuran kualitas kebijakan.
- KETIGA : Tim Pengukuran Kualitas Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Utama.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Tim Pengukuran Kualitas Kebijakan dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2026

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI PENGUKURAN
KUALITAS KEBIJAKAN BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI KUALITAS KEBIJAKAN BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Tonny Agung Arifianto	Sekretaris Utama	Penanggung Jawab
2.	Edi Subowo	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Ketua
3.	Kahfi Heriyanto	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Wakil Ketua I
4.	Plt. Direktur Evaluasi	Direktur Evaluasi	Wakil Ketua II
5.	Siti Maimunah	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	Koordinator Instansi
6.	Prakoso	Analisis Kebijakan Ahli Utama	Anggota
7.	Dodi Setiawan	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	
8.	Yoga Nathasa Amin	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	
9.	Ibnu Triwijaya	Analisis Hukum Ahli Madya	
10.	Agus Salim	Auditor Ahli Madya	
11.	Rimon Adar Marulam Siregar	Analisis Kebijakan Ahli Madya	
12.	Sapta Mupakat Tatar Purba	Analisis Kebijakan Ahli Madya	
13.	Eko Boedijanto	Analisis Kebijakan Ahli Madya	
14.	Sri Sulistijaningsih	Analisis Kebijakan Ahli Madya	
15.	Feri Devina	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	
16.	Muhammad Aliyudin	Kepala Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	
17.	Fitriya Wulansari	Kepala Subbagian Organisasi	
18.	Indra Wiguna	Kepala Subbagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat	
19.	Basuki Katono	Analisis Hukum Ahli Muda	

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
20.	Widya Castrena Budi Dharma	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	
21.	Franko Jhoner	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	
22.	Zainul Amal Muhammad	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	
23.	Adi Setiawan	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	
24.	Widi Adi Tama	Perencana Ahli Pertama	
25.	Jumarlin Paulus Oktavianus	Perencana Ahli Pertama	
26.	Leny Retnaningrum	Auditor Ahli Pertama	
27.	Gilang Hardiono	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	
28.	Hilwan Givari	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	
29.	Abed Naser Sembiring	Penelaah Kebijakan Teknis	
30.	Angger Suryokusumo	Penelaah Kebijakan Teknis	
31.	Ahmad Kosim	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	
32.	Ramos Aruan	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	
33.	Dewi Bunga Farizi	Penelaah Kebijakan Teknis	
34.	Bayu Aditya Pradana	Penata Kelola Pemerintahan	
35.	Renaldi Puji Kurnia	Arsiparis Terampil	

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto